

Judul : Sistem rujukan berjenjang, percayakan putusan medis kepada dokter
Tanggal : Sabtu, 18 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sistem Rujukan Berjenjang Percayakan Putusan Medis Kepada Dokter

ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto meminta masyarakat mematuhi mekanisme pelayanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam sistem rujukan berjenjang. Karena sistem pelayanan berjenjang ini diterapkan agar setiap peserta memperoleh penanganan yang tepat dan efektif sesuai dengan kondisi medisnya.

Edy mengimbau masyarakat agar tidak selalu memaksakan diri meminta rujukan ke Rumah Sakit (RS) jika penyakitnya masih bisa ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik. Jangan setiap sakit langsung meminta dirujuk ke rumah sakit.

"Keluhan seperti batuk, pilek, atau pusing sering kali masih bisa ditangani di FKTP. Percayakan keputusan medis kepada dokter," tegas Edy di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Edy, FKTP berfungsi sebagai pintu masuk utama pelayanan kesehatan. Rujukan ke rumah sakit baru akan diberikan jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter memang benar-benar diperlukan tindakan lanjutan.

Karena itu, ia meminta masyarakat agar tidak bertindak sebagai 'dokter' bagi diri sendiri dengan menentukan diagnosis maupun bentuk pengobatan yang diinginkan. Karena keputusan mengenai rawat inap, tindakan medis, hingga kapan pasien diperbolehkan pulang merupakan kewenangan penuh dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menambahkan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan perlu menjadi perhatian

di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencari solusi pembiayaan yang mampu menjaga keberlanjutan program JKN tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.

"Dalam kondisi yang sulit ini, bahkan sudah banyak yang dinonaktifkan pesertanya, BPJS Kesehatan masih defisit Rp 2 triliun," sebut Irma di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Irma, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN adalah dengan mengoptimalkan sisa dana kapitasi di puskesmas untuk memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC). "Tolong lihat lagi sisa-sisa dana yang ada di kapitasi puskesmas, bisa menambah kantong anggaran untuk melakukan penambahan kuota UHC," imbau politisi Nasdem ini.

Diketahui, UHC merupakan sistem yang memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkan. Sedangkan kapitasi UHC adalah metode pembayaran di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana ini diberikan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, bukan dari tingkat kehadiran atau tindakan medis.

Selain itu, Irma meminta Pemerintah tetap mempertahankan alokasi anggaran kesehatan primer agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. ■ TIF